



<https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>



@PPID Kabupaten Pesisir Selatan



@diskominfoessel



@Kominfo Pessel



@Kominfo Pesisir Selatan

LKj

LAPORAN KINERJA

2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESIR**

SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan komunikasi dan informatika pada tahun 2024 dan merupakan tahun ke empat pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Program dan kegiatan-kegiatan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah terciptanya komunikasi dan informatika secara umum untuk mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman Renstra, Program dan Kegiatan pada periode 2021-2026 kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan

WENDI, SH., M. Hum

NIP. 19760407.199803 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan pertanggungjawaban Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai sasaran strategis Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan seluruh unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjikan Kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari Hasil pengukuran kinerja Tahun 2024, pengukuran dilakukan terhadap 5 (lima) Sasaran Strategis dengan menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja yang diukur dengan hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)	A (85,49)	101%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,20	4,23	100,7%
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,38	92%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (99,95)	Menuju Informatif (86,68)	86,7%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95%
Rata-Rata Capaian					95,08%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 GAMBARAN ORGANISASI	4
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	6
1.6 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG	7
1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
1.8 PERMASALAHAN UTAMA	9
1.9 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA	13
2.3 APLIKASI PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA	14
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA	18
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	18
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.4 Realisasi Keuangan	73
BAB IV	75
PENUTUP	75
4.1 KESIMPULAN	75

4.2 SARAN	76
-----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024	ii
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai	6
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural	7
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya	7
Tabel 1. 5 Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	7
Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	13
Tabel 2. 2 Program dan Anggaran	14
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	16
Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	19
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024	21
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	22
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	22
Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024	23
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	23
Tabel 3. 8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	32
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	34
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	35
Tabel 3. 12 Perbandingan Indeks SPBE dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024	35
Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	36
Tabel 3. 14 Nama Aplikasi yang di buat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2024	39
Tabel 3. 15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	51
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	52
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	53

Tabel 3. 19 Perbandingan Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024	53
Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	54
Tabel 3. 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	57
Tabel 3. 23 Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	58
Tabel 3. 24 DAFTAR REKAP PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN	62
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	64
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	64
Tabel 3. 27 Perbandingan Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024	65
Tabel 3. 28 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	65
Tabel 3. 29 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
Tabel 3. 30 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024	68
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	70
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	71
Tabel 3. 33 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	71
Tabel 3. 34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2024	74
Data Dukung	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan .5	
Gambar 3. 1 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	24
Gambar 3. 2 Dokumentasi Pemberian Reward dan Punishment	26
Gambar 3. 3 Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023	27
Gambar 3. 4 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	28
Gambar 3. 5 Matrik Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	29
Gambar 3. 6 Struktur Penilaian SPBE	33
Gambar 3. 7 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat	36
Gambar 3. 8 Nilai Indeks SPBE per Domain	52
Gambar 3. 9 Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024	60
Gambar 3. 10 Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2023	69
Gambar 3. 11 Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian

singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 2 ndi, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- m. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah sebagai bahan pelaporan tahunan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja tentang Indikator kinerja Utama tahun 2024, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan :

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sarana

pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.

2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

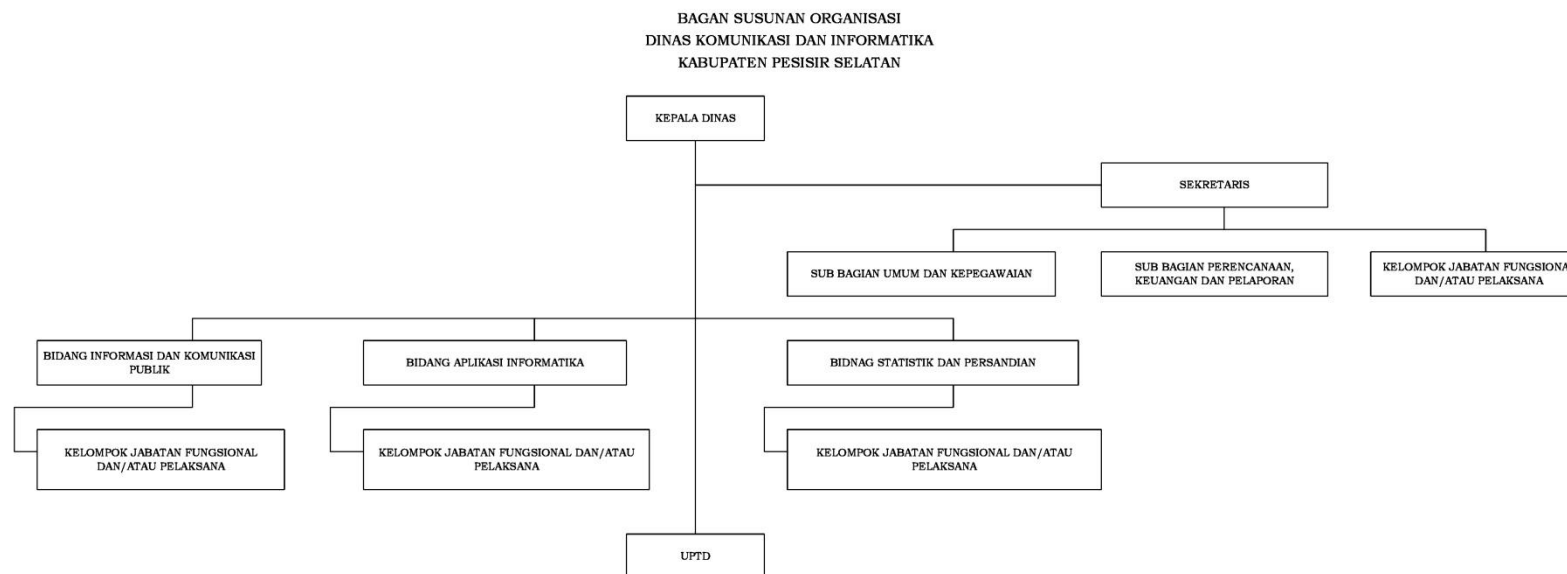
1.4 GAMBARAN ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika; yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 4 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 adalah sebanyak **34** (tiga puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA MADYA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I/ IV b	2
3	PEMBINA / IV a	3
4	PENATA TK. I / III d	9
5	PENATA / III c	2
6	PENATA MUDA TK.I / III b	2
7	PENATA MUDA/ III a	9
8	PENGATUR TK. I, II/d	1
9	PENGATUR / II c	5
JUMLAH		34

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	8
3	S1 / D4	16
4	D III	7

5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	3
7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		34

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIKLAT PIM II	0
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	5
JUMLAH		8

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	7
2	FUNGSIONAL TERTENTU	22
3	FUNGSIONAL UMUM	5
JUMLAH		34

1.6 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 5 Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	

4	Kamera Foto Biasa	2	Buah
5	Komputer/Destop	14	Buah
6	Laptop	21	Buah
7	Server	8	Unit
8.	GPS	1	Unit
9.	Infocus	2	Unit
10.	CCTV	26	Unit
11.	NVR	4	Unit
12.	Handicam	1	Unit
13.	Kamera Studio	2	Unit
14.	Televisi	7	Buah
15.	Mini PC	3	Unit
16	Printer	15	Unit
17	Router Board	2	Unit
18	Penunjang Server dan Aplikasi	1	Paket
19	Mini Tower	13	Buah
20	Videotron	1	Buah
21	Papan Reklame	9	Buah
Jumlah		146	

1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki beberapa aspek strategis yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah.
2. Pengaturan dan Pengawasan berbagai aspek terkait komunikasi, teknologi informasi, dan media massa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan konsumen, serta keamanan dan integritas data.
3. Mendorong produksi dan distribusi konten digital yang bermutu, informatif, dan edukatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

4. Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program-program pelatihan, sosialisasi, dan advokasi untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital dan memperkuat daya saing.
5. Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui pengembangan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan informasi internasional.
6. Pengembangan Inovasi Teknologi: Mendorong inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mendukung ekosistem startup dan industri kreatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing nasional.
7. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
9. Mengelola dan mengawasi penyiaran serta penyelenggaraan informasi 9 ndica untuk memastikan akses informasi yang merata, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
10. Membangun kapasitas dalam penanganan darurat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menghadapi dan merespons ancaman keamanan siber serta gangguan teknis lainnya dengan cepat dan efektif.
11. Melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Statistik,Peningkatan Kualitas Data,Pengembangan Kapasitas SDM,Penggunaan Teknologi dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan pada urusan statistik sektoral.

1.8 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang merata di Kab.Pesisir Selatan
2. Mendorong produksi dan distribusi konten digital yang bermutu, informatif, dan edukatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat
3. Pemberdayaan Masyarakat Digital dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program-program pelatihan, sosialisasi, dan advokasi untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital dan memperkuat daya saing.
4. Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui pengembangan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan informasi internasional.
5. Pengembangan Inovasi Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
6. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Penyiaran dan Penyelenggaraan Informasi Publik untuk memastikan akses informasi yang merata, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
8. Memastikan akurasi dan validitas data, standarisasi data, aksesibilitas data dan resiko terhadap keamanan data.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa misi I berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, yakni : **“Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.”**

2.1.3 Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 ada lima sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan
4. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun yang ditandatangani antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,20
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis	4,76

		Elektronik (SPBE)	
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100

Dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah direncanakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Program dan Anggaran dari program tersebut pada tahun 2024 yang tertera pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Program dan Anggaran

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.927.7165.282
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 991.743.136
Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.138.592.627
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 144.709.640
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 57.579.802
Total Anggaran	Rp. 8.230.341.487

2.3 APLIKASI PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai aplikasi pendukung dapat digunakan untuk membantu mencapai kinerja yang optimal. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain:

1. Aplikasi Penatausahaan Keuangan SIPD RI
2. Aplikasi E-SAKIP untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo
3. Aplikasi IGA untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.
4. Aplikasi Simbangda untuk melihat capaian realisasi fisik dan keuangan pada pelaksanaan program kegiatan.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengukur keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maka Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026									
Indikator Sasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Memperkuat tata laksana pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan									
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Inspektorat Daerah	A	A	A	A	A	A	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Indeks SPBE	Nilai	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	3,35	3,40	3,55	3,75	3,95	4,00	
3. Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} + \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ - Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-I; - Bdi adalah nilai bobot domain ke-I; - Naij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-I; - Baij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I.	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25	

4. Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Angka	Hasil evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	<i>Informatif (93)</i>	<i>Informatif (93)</i>	<i>Informatif (99,92)</i>	<i>Informatif (99,95)</i>	<i>Informatif (99,95)</i>	<i>Informatif (99,95)</i>
5. Nilai Inovasi Daerah	Kematangan Inspektorat	Tanpa Satuan	Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah yang diinput di aplikasi Innovation Government Award	-	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2024**

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)	A (85,49)	101%	Sangat Baik
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,20	4,23	100,7%	Sangat Baik
Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,38	92%	Sangat Baik
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	MENUJU INFORMATIF (86,68)	86,7%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95%	Sangat Baik
Rata-rata capaian (%)				95 %	Sangat Baik
(Prediket : Sangat Baik)					

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target A (84,5).
Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah A (85,49) atau sebesar 101% dengan predikat **Sangat Baik**.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

- 2) Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan dengan Target 4,20
Capaian indikator Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 4,23 atau sebesar 100,7% dengan predikat **Sangat Baik**.
- 3) Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan dengan target 4,38
Capaian indikator Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 4,76 atau sebesar 92% dengan predikat **Sangat Baik**.
- 4) Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan target informatif (99,95).
Capaian Indikator Kategori Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menuju informatif (86,68) atau sebesar 86,7% dengan predikat **Sangat Baik**.
- 5) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target 100.
Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 95,00 atau sebesar 95,00% dengan predikat **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)	A (85,49)*	101%
Rata- Rata capaian (%)				101%

*Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023*

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,58)	A (83,94)	A (85,49)*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (88,00)	A (85.49*)	97	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (85,49)*	B (69,78)	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

**) Data Capaian Tahun 2022

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)	A (85,49)*	101%

Faktor pendorong dalam Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a) Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/login>.



Gambar 3. 1 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) untuk

mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment. Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2024 telah memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika menilai kinerja bawahannya melalui tingkat kedisiplinan dan layanan pembuatan konten diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dapat dilihat hasil monev terhadap kontributor pada Gambar 3.2 dibawah ini :

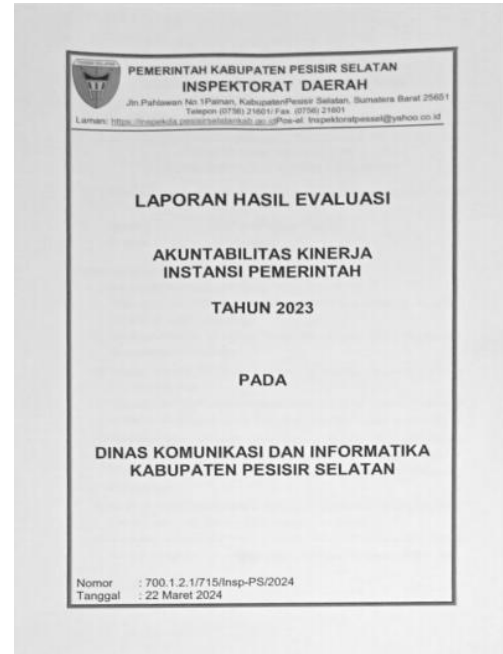




Gambar 3. 2 Dokumentasi Pemberian Reward dan Punishment

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.4 dibawah ini dapat dilihat Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3. 3 Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2023

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

f. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (84,5)	A (85,49)*	101 %	4.927.716.282	4.554.285.437	92,42%	7,58%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah A (84,5), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dengan nilai A (85,49) serta untuk capaian kinerja sebesar 101%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,55% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (83,94).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,11
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,34
4	Evaluasi Internal	25,00	23,04
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		85,49
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Gambar 3. 4 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja
 - a) Agar membuat SOP pengumpulan data kinerja

- b) Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan.
 - c) Agar pengukuran kinerja dapat menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
 - d) Agar pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi
- 2) Pelaporan Kinerja
 - a) Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional.
 - b) Agar dokumen target kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas keberhasilan/kegagalan pencapaian beserta upaya nyata yang dilakukan untuk semua sasaran .
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar memantau SOP Pemantauan capaian kinerja internal mencakup sampai dengan proses evaluasi kinerja internal.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Tahun 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Pemangkuang Jawab	Status/Progress Pelaksanaan	Koordinator	Eviden
1.	Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja	Telah membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja	1 (satu) Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Tahun 2022	Kepala Dinas Kominfo	Selesai	Sekretaris Dinas Kominfo	LHE R. 1.1 SOP
2.	Membuat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal	Telah membuat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal	1 (satu) Dokumen SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal	Tahun 2024	Kepala Dinas Kominfo	Selesai	Sekretaris Dinas Kominfo	LHE R. 1.2 SOP

Painan, 6 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

Gambar 3. 5 Matrik Tindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.554.285.437 atau 92,42% dari total anggaran sebesar Rp. 4.927.716.282, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,58%.



SASARAN 2 :

MENINGKATNYA KAPABILITAS BIROKRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks SPBE.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks SPBE	4,20	4,23	100,7%

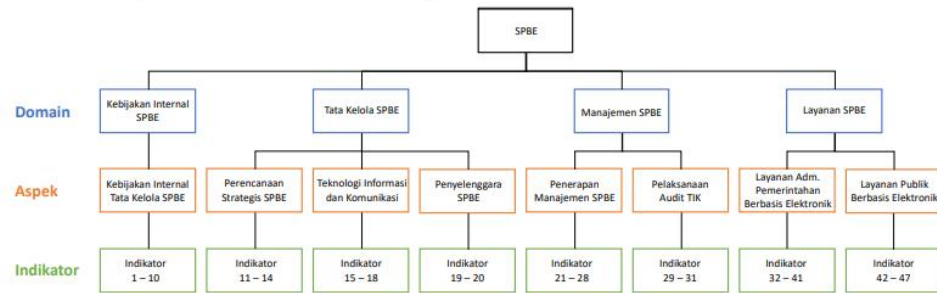
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Tahun 2024 dengan tingkat capaian 4,23 dengan capaian 100,7 % predikat sangat baik dari target 4,20 .

Indeks SPBE merupakan nilai menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.



Gambar 3. 6 Struktur Penilaian SPBE

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.6, Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2024, hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,23 dengan prediket Memuaskan .

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

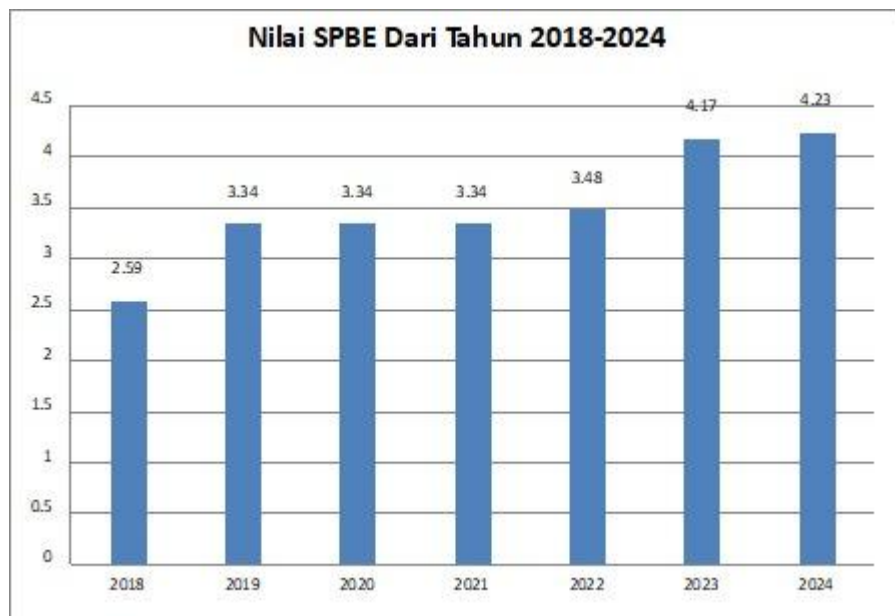
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,34	4,17	4,23

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa Indeks SPBE setiap tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024 kenaikan sebesar 0,06% dari tahun 2023.

Pencapaian Nilai SPBE dari tahun 2018 –2024



Keterangan :

- Indikator penilaian dari Tahun 2018-2020 sebanyak 35 indikator
- Indikator penilaian dari Tahun 2021-2024 sebanyak 47 indikator

Grafik Hasil Indeks SPBE tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks SPBE dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,75	4,23	113%	Akan tercapai lebih dari 100%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks SPBE dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3. 12 Perbandingan Indeks SPBE dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,23	3,85	3,12

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,85	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,56	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	3,51	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,23	Memuaskan
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	2,81	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	3,00	Baik
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3,28	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3,61	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	3,66	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	3,16	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,41	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,75	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,96	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,75	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	3,44	Baik

Gambar 3. 7 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks SPBE dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,20	4,23	100,7%

Faktor pendorong dalam Peningkatan Indeks SPBE , adalah :

- Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah terdapatnya 1 aspek penerapan SPBE yaitu Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah mendapatkan nilai yang sempurna, diikuti oleh 6 aspek yaitu aspek Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- Satu aspek lainnya yaitu aspek Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi Komunikasi masih perlu disempurnakan. Pelaksanaan Audit TIK yang optimal akan mendorong kemajuan yang signifikan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal transparansi, keamanan, efisiensi, kualitas layanan, dan keputusan berbasis data.
- Audit yang dilakukan secara terencana dan teratur serta mendalam akan membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan TIK, mencegah risiko, serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih responsif dan modern. Dengan demikian, audit TIK bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong transformasi digital yang lebih baik dan efisien di sektor publik.

Namun di sisi lain penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih terdapat satu kelemahan, yaitu : Penerapan Manajemen perubahan SPBE. Pelaksanaan manajemen perubahan yang optimal di pemerintah daerah tidak hanya mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan layanan publik, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan perubahan yang terkelola dengan baik, pemerintah daerah dapat menjadi lebih responsif, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, baik dalam aspek teknologi, pengelolaan sumber daya, maupun pelayanan masyarakat. Maka oleh sebab itu, Amat penting sekali bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen perubahan SPBE ini. Untuk itu ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan.

1. Meningkatkan penerapan manajemen perubahan, membutuhkan pendekatan yang terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai stakeholder dan pengembangan SDM.

2. Dapat didukung pula dengan peningkatan pengelolaan risiko, serta pendekatan berbasis data dan teknologi.
3. Untuk setiap indikator yang ada, perlu dilakukan proses reviu dan evaluasi secara berkala. Kemudian proses tindaklanjutnya pun harus segera dilakukan paling lambat dalam periode 1 tahun.

Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi menjadi salah satu factor dalam peningkatan nilai SPBE

Tabel 3. 14 Nama Aplikasi yang di buat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2024

NO	Nama Aplikasi	Nama Lengkap	Kegunaan/ Fungsi	Programmer	Platform	Motode Akses	Tahun Pembuatan	Tahun penggunaan	Tahun Pengembangan
1	SIPD	Sistem Infomasi Pemerintah daerah	Perencanaan,Peng anggaran dan Penatausahaan	Pusdatin Kemendagri,Rezki Fernando Putra, S.Kom	Web	Online - Web Browser		2019	
2	GIS Insfrastuktur				Dekstop		2017		
3	E-PLANNING	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan		Web	Online - Web Browser	2017		
4	E-PAD	Elektronik Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak		Web	Online - Web	2017		
5	SISMIOP	Sistem Manajemen Infomasi Objek Pajak	Mengintegrasikan seluruh aspek		Dekstop		2017		
6	SAPK	Sistem Aplikasi Pelayanan	Digunakan dalam		Web	Online - Web	2017		
7	SIM GAJI				Dekstop	Online - Web	2017		
8	SIPKD	Sistem Informasi	Penatausahaan		Web	Online - Web	2017	2017	
9	SIPKD Modul	Sistem Informasi	Publikasi Menu		Web		2017		
10	E-RTLH						2017		
11	E-PUSKESMAS	Elektronik Puskesmas	Sarana Pengolahan Data Puskesmas		Web		2017		

12	SLRT						2017		
13	SIKS-NG						2017		
14	SIM-PKH						2017		
15	SIMFONI						2017		
16	SIMDAPODIK				Web		2017		
17	SIMTUN				Web		2017		
18	SIMDAK				Web		2017		
19	SIMUN				Web		2017		
20	SIKAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Aplikasi Pengelolaan Kependudukan		Web	Online - Lokal	2017		
21	SIM-PKB						2017		
22	SLIMS				Web		2017		
23	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa			Dekstop	Online - Remote Desktop	2015	2016	2016-2021
24	CELOK	Cek Lokasi Pessel	Informasi Lokasi Wisata Pesisir	Riki Dwi Putra, M. Kom	Android	Mobile Android	2017	2017	2019
25	TV Pessel	TV Pessel	Media Publikasi Pemda Pesisir Selatan	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online	2017	2017	
26	PRODESKEL						2017		

27	PORTAL DESA						2017		
28	SIPO				Web		2017		
29	SPIPISE						2017		
30	ANJAB-ABK				Web		2017		
31	JKN				Web		2017		
32	SPSE / SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan			Web		2017		
33	INAPROC				Web		2017		
34	E-FORMASI				Web		2018		
35	Talent Pool				Web		2018		
36	SIM-RS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit		Riki Dwi Putra, M.Kom, Masri Prima Doni, M.Kom	Dekstop	Online-Lokal	2018		
37	E-BOS				Web		2018		
38	Aplikasi Antrian Pelayanan		Sistem Layanan Antrian PTSP	Masri Prima Doni, M.Kom	Dekstop		2018		
39	E-LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat		Web	Online-Web Browser	2018		

40	SIMANTRA	Sistem Informasi Manajemen Integrasi	Layanan Penghubung/Integrasi	Dedet Masriyuni, S. Kom	Web	Online-Lokal	2018		
41	DASHBOARD	Website Pesisir Selatan	Portal Pemerintah Daerah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online-Web	2018	2018	2019
42	OSS	Online Single Submission			Web	Online-Web Browser	2018		
43	SIBAPER	Sistem Informasi Barang Persediaan	Administrasi Aset Kantor	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2018	2018	
44	Web Client Pajak	Web Client E-PAD Pessel	Administrasi Pajak Daerah	Zikri Nur Mustafa, M.Pd.T	Web	Online - Web	2019		
45	eTPP	Aplikasi Tambahan Penghasilan	Digunakan untuk entry laporan harian	Masri Prima Doni, M.Kom	Web - Mobile Android	Online - Web	2019	2021	2021;2022 ;2023
46	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian	digunakan untuk hal-hal terkait	Brahmana Adi Putra(BKPSDM), Masri Prima Doni, M.Kom,	Web	Online - Web	2019		2022;2023
47	SIPENAMPU NG SINAR	Sistem Informasi Penampungan Data	Tata kelola Data Kampung Nagari	Riki Dwi Putra, M. Kom, Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	
48	PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Informasi Publik	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom, Rama, Rezki	Web	Online - Web	2019	2019	
49	WBS	Whistle Blowing System	Pengawasan Internal	Sudindri Rahmad Febuanda, S.T	Web	Online - Web	2019		
50	E-SPPD	Sistem Informasi Perjalanan Dinas	Monitoring Perjalanan Dinas Pemda	Kominfo Prov. Sumbar, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021

51	SIMAYA	Sistem Administrasi Perkantoran Maya	Administrasi Surat-menyurat	Kominfo Prov. Sumbang, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020
52	MANDEH	Monitoring Anggaran Desa Hebat	Untuk melakukan monitoring	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2019	2020	202.020.2 12.022
53	WEBSITE BERITA	Webiste Pemerintah Kabupaten	Media Publikasi Berita Pemerintah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021
54	SINAR - 182 SUB DOMAIN	Sistem Informasi Nagari	Mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom, Ramadani Ilham, S.Kom, Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web Browser	2019		
55	SiCANTIK Cloud	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	Indetifikasi Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	Kemenkominfo, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	2020;2021
56	SIMARDI			Rezki Fernando Putra, S. Kom	Dekstop		2019		
57	E-SAKIP	Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan	Sistem Akuntabilitas Pemerintah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021 ;2022;2023
58	JDIH	Jaringan Dokumentasi Informasi Publik	Wadah pendayagunaan	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima	Web	Online - Web Browser	2019	2019	2020

			bersama atas dokumen hukum secara tertib,	Doni, M.Kom					
59	SIMBANGDA	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Administrasi Pembangunan Daerah	Setda Prov. Sumbar, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2021	2022
60	TALIKASI	Portal Layanan Informasi & Komunikasi Terintegrasi	Portal Layanan Informasi Komunikasi	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	
61	WEBSITE OPD	Webiste Perangkat Daerah	Media Publikasi Perangkat Daerah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2018	2018	2020;2021 ;2022
62	E-KINERJA BKN	Sistem Informasi Kinerja ASN	Evaluasi Kinerja ASN	BKN, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2020	2021	2022
63	WEBSITE LPPL RADIO LANGKISAU	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Media Publikasi Radio Langkisau FM	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2018	2018	
64	APLIKASI WEB MAIL OPD	Mail Perangkat Daerah	Surat Menyurat Perangkat Daerah	Dedet Masriyuni, S.Kom	Web	Online-Web Browser	2017		
65	APLIKASI WEB MAIL ASN	Mail Perangkat Daerah	Surat Menyurat ASN Pemda	Dedet Masriyuni, S.Kom	web	Online-Web Browser	2017		
66	APLIKASI CLOUD KOMINFO	Storage Dan Share Data			Web	Online-Web Browser	2018		
67	SIMHP				Web		2021		

68	SIPTL				Web		2021		
69	LAPOR SP4N	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	Monitoring Pengelolaan Pengaduan	Kemenpan RB	Web	Online - Web	2021		
70	OPENDATA	Satudata terbuka	Publikasi data Sektoral Pemerintah	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2021	2021	2022
71	UKW	Unit Kepatuhan Warga	Aplikasi Pelaporan Masyarakat	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2021		
72	IBI PESSEL	Ikatan Bidan Indonesia Pesisir Selatan	Ujian kompetensi bidan di pesisir	Ramadani Ilham. S, Kom	Web	Online - Web	2021	2021	2022
73	PESSEL DALAM	Pesisir Selatan Dalam Genggaman	Digunakan untuk melihat data	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom, Rezki	Android	Online -	2022	2022	
74	BPHTP Pajak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Pendaftaran Hak atas tanah dan	Ramadani Ilham. S. Kom, Masri Prima Doni. M. Kom	Web	Online - Web Bro	2022	2023	2023
75	ABON Pessel	Absensi Online	Mempermudah Pengambilan Absensi	Masri Prima Doni, M.Kom	Android	Online -	2021	2021	2022, 2023
76	APLIKASI FLLAJ BERBASIS WEB	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sebagai wadah pelaporan masyarakat terkait Lalu Lintas dan Angkutan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020		
77	APLIKASI BEASISWA PESSEL	Aplikasi Beasiswa Pesisir Selatan	Untuk Menjaring Siswa/i berprestasi yang berada di kabupaten Pesisir Selatan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020		

78	APLIKASI UPK DPM DPPKB	Unit Pengelola Keuangan	Berfungsi untuk mempermudah Pengelolaan Keuangan pada Unit	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2021		
79	SiRomet	Aplikasi Room Meeting	Berfungsi untuk mempermudah pemakaian ruangan pertemuan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2022		
80	APLIKASI FLLAJ BERBASIS ANDROID	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Monitoring Penggunaan Lalulintas dan pengguna jalan	Feby Pramadian. S. Kom	Android	Online - Mobile Android	2022	2022	
81	Aplikasi Vaksin	Aplikasi Vaksin	Monitoring penggunaan Vaksin	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2021		
82	Aplikasi Informasi Digital	Aplikasi Informasi Digital	Sebagai sarana untuk menampilkan informasi berupa gambar, video, Teks	Feby Pramadian. S. Kom	Web - Client	Online	2019		
83	Aplikasi e-Monev	Evaluasi Monitoring	Digunakan untuk Monitoring capaian	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2018		
84	Siguru	Sistem Informasi Guru Kontrak	Monitoring Informasi Guru Kontrak	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
85	Simapan	Sistem Informasi Masyarakat Penerima	Digunakan untuk melakukan	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2021	2022	
86	SPBE	Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	Digunakan untuk pelaksanaan penilain spbe secara internal	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web Browser	2021	2021	2022;2023

87	siPENDEKAR	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran	kejadian di pesisir selatan dan	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
88	siGAP-DANA	Sistem Informasi Tanggap Bencana	alam	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
89	PPDB Online	Penerimaan Peserta Didik Baru	Sistem Penerimaan Siswa SMP	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
90	eSURVEY	Survey Statistik Potensi Nagari	Daerah melalui Survey Statistik	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
91	siMANTAN	Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	Manajemen Pertanahan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
92	Lapau PESSEL	Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Pessel	Aplikasi Pemasaran Produk UMKM	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
93	Manrisk SPBE	Aplikasi Manajemen Risiko SPBE	Pengolahan Data OPD Untuk SPBE	Ramadani Ilham. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020	2022	2022;2023
94	SIPPORA Pessel	Aplikasi Informasi Pariwisata	Informasi Pariwisata	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
95	Pronasa	Program Nagari Bersekolah	Untuk pendataan dan monitoring	Riki Dwi Putra, M. Kom, Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
96	E-Inflasi	Laporan Pengawasan Inflasi Daerah	Untuk laporan pengawasan harga	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web Mobile	Online - Web	2022	2022	
97	Booking Semangki	Aplikasi tiket booking wisata semangki	Untuk melakukan pemesanan tiket	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web Mobile	Online - Web	2022	2023	
98	Puskesmas SIMRS	Aplikasi Manajemen Puskesmas	Untuk manajemen layanan puskesmas	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
99	Parenting	Percepatan Aksi Recovery Stunting	Untuk verifikasi data stunting	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
100	eTLHP	Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
101	siANJASMARA	Aplikasi Kerjasama Perusahaan Pers	Kerjasama Media Massa	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	

102	eASET BMD	Aplikasi Manajemen Aset daerah	Pengelolaan Barang Milik daerah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
103	SIMPADEH	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah	Administrasi Pajak Daerah	Ramadani Ilham, S.Kom, Masri Prima Doni, M.Kom,	Web	Online - Web	2019	2022	2022
104	Aplikasi covid 19	sistem informasi monitoring sebaran virus covid	peta informasi sebaran	Riki Dwi Putra, M.Kom	web			2019	

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,20	4,23	100,7%	2.196.172.429	2.133.502.713	97,15%	2,85%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Target Indeks SPBE Tahun 2024 adalah 4,20, dan untuk realisasinya Tahun sebesar 4,23 serta untuk capaian kinerja sebesar 100,7%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,03% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 4,17.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan terdiri dari :

1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

II. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks SPBE Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.196.172.429 atau 92,42% dari total anggaran sebesar Rp. 2.133.502.713, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,85%.



SASARAN 3 :

MENINGKATNYA DIGITALISASI PEMERINTAHAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

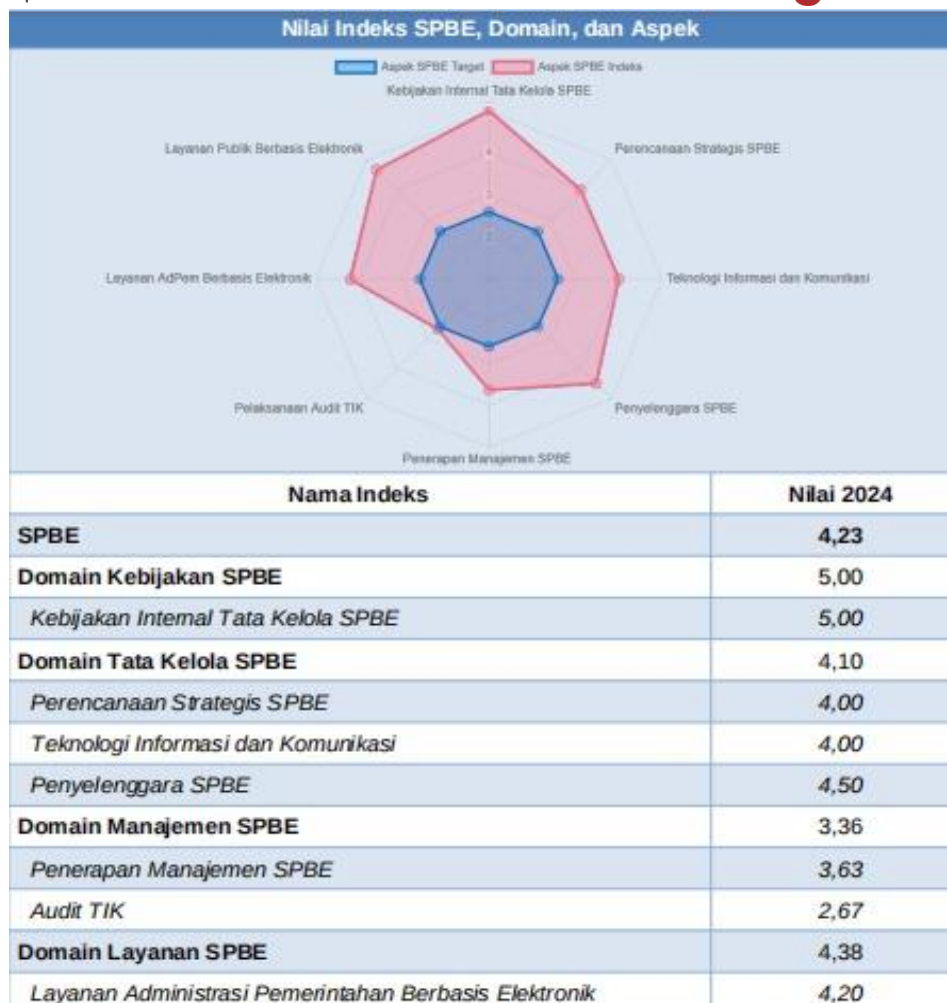
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,38	92%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 dengan tingkat capaian 4,38 dengan capaian 92% predikat sangat baik dari target 4,76 .

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum.



Gambar 3. 8 Nilai Indeks SPBE per Domain

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,20	4,76	4,38

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan sebesar 0,38% dari 4,76 pada Tahun 2023 menjadi 4,38 pada Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,25	4,23	113%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

h. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini.

Tabel 3. 19 Perbandingan Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,23	4,26*	3,78

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

<https://data.sumbarprov.go.id/>

i. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini :

Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,38	92%

Faktor kegagalan kinerja , adalah :

Dalam hasil reviu Kemenpan RB dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek layanan publik berbasis elektronik tapi masih belum adanya reviu rutin terhadap Layanan Data Terbuka sudah terintegrasi dengan aplikasi Pessel Dalam Genggaman (pasisie) dan layanan JDIH telah terintegrasi dengan JDIH Nasional menggunakan system API-JASON dan Aplikasi Portal SPBEPesisir Selatan.

Hasil Penilaian Menpan RB

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan publik berbasis elektronik sudah dipenuhi oleh Pemkab Pesisir Selatan. Setiap data dukung yang diberikan telah menunjukkan secara jelas bahwa semua layanan publik berbasis elektronik di Pemkab Pesisir Selatan telah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain seperti Layanan SP4NLapor yang sudah terintegrasi secara nasional, layanan PPID yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi Sinar (Sistem Informasi Nagari), Web Perangkat Daerah, Data kependudukan dan PPID Provinsi Sumatera Barat, Layanan SINAR yang sudah terintegrasi dengan aplikasi PPID, dan Layanan SIMPADEH yang sudah terintegrasi dengan SIPKD dan Layanan Perbankan. Empat layanan publik di atas, bahkan telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan. Sedangkan 2 layanan lainnya, walaupun sudah terlihat berkolaborasi, misalnya Layanan Data terbuka sudah integrasi dengan aplikasi Pessel dalam Genggaman (pasisie) dan Layanan JDIH telah integrasi dengan JDIH Nasional menggunakan system API – JSON dan Aplikasi portal SPBE Pesisir Selatan, namun belum terlihat tindaklanjut dari hasil reviu rutinnya.

- **Kekuatan**
Pada aspek layanan publik berbasis elektronik ini dapat terlihat kesemua indikator sudah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pesisir Selatan. Baik aplikasi layanan publik berbagi pakai secara nasional, maupun layanan publik yang dibuat berdasarkan kearifan lokalnya. Semuanya sudah terlihat pemanfaatannya oleh masyarakat yang semakin terus meningkat.
- **Kelemahan**
Pemkab Pesisir Selatan tidak memiliki kelemahan pada aspek layanan publik berbasis elektronik

Solusi yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan reviu rutin terhadap pelaksanaan layanan yang berbasis elektronik. Hal ini akan di koordinasikan dengan level pimpinan untuk mendapatkan hasil terbaik atas pelaksanaan reviu tersebut.

j. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,38	92 %	2.196.172.429	2.133.502.713	97,15%	2,85%

Target Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 adalah 4,76, dan untuk realisasinya Tahun sebesar 4,38 serta untuk capaian kinerja sebesar 92%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,38% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 4,76.

k. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

II. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.196.172.429 atau 92,42% dari total anggaran sebesar Rp. 2.133.502.713, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,85%.



SASARAN 4 :
**MENINGKATNYA KETERBUKAAN
INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Kategori Keterbukaan Informasi Publik.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (99,95)	Menuju Informatif (86,68)	86,7%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.22 di atas dapat dilihat bahwa Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan tingkat capaian Menuju Informatif (86,68) dengan capaian 86,7% prediket sangat baik dari target Informatif (99,95).

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Tabel 3. 23 Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

NO	KUALIFIKASI	NILAI
1	Informatif	97-100
2	Menuju Informatif	80-96
3	Cukup Informatif	60-79
4	Kurang Informatif	40-59
5	Tidak Informatif	<39

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor : : 04 /KEP/KI-PSB/XII/2024- Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024. Hasil perolehan penetapan kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 dengan nilai **86,68** dalam kategori **Menuju Informatif**.

Dalam pencapaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 menyediakan :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirseltankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2024 untuk masingmasing kategori:

a. OPD	: 2.425 DIP
b. Kecamatan	: 626 DIP
c. Nagari	: <u>754 DIP</u>
Total	3.805 DIP

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/116/Kpts/BPTPS/2023 .
5. Mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) guna peningkatan kapasitas SDM PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Pembinaan dan Pendampingan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti. Nagari Air Haji Barat mewakili Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2024.
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan dari bulan November – Desember 2024.

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2024, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain 4 (empat) indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik, kedua tahap verifikasi kuesioner dan website dan ketiga tahap

visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.

Tahapan Pengisian Kuesioner diawali dengan pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ) oleh Tim Sekretariat Pemeringkatan yang selanjutnya harus diisi oleh PPID Pelaksana dan PPID Nagari yang akan menghasilkan penilaian Tahap 1 sebagai dasar untuk menetapkan 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi dan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu Presentasi/Uji Publik.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Pengembalian Kuesioner dengan bobot nilai 10%. Setiap Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian mandiri akan mendapatkan bobot nilai sebesar 10 poin.
2. Tahapan verifikasi kuesioner dan website dengan bobot nilai 80%.
3. Tahapan Presentasi/Uji publik, dengan bobot nilai 10% dengan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Komitmen (20%)
 - b. Koordinasi (20%)
 - c. Komunikasi (20%)
 - d. Kolaborasi (20%)
 - e. Konsistensi (20%)

Presentasi/Uji Publik dilaksanakan secara panel dengan menghadirkan Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 bertempat di Hotel Triza Painan.



Gambar 3. 9 Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Jumlah Badan Publik yang mengisi/mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri/ *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) :

1. Perangkat Daerah sebanyak 20 OPD (76,92%)
2. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan (66,67%)
3. Nagari sebanyak 18 Nagari

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai kemudian menetapkan Berita Acara Penetapan Hasil Akhir Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Nomor : 500.12.18.1/230/KOMINFO-PS/2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	PRESENT ASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI ASI
1	DINAS Komunikasi dan Informatika	88.05	9.50	97.55	Informatif
2	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	80.78	9.39	90.17	Informatif
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	78.23	8.79	87.02	Menuju Informatif
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.09	7.51	86.60	Menuju Informatif
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	79.80	6.21	86.01	Menuju Informatif

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	PRESENT ASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI ASI
1	RANAH AMPEK HULU TAPAN	86.04	9.50	95.54	Informatif

2	AIRPURA	75.95	9.14	85.08	Menuju Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	76.91	7.38	84.29	Menuju Informatif
4	IV JURAI	70.50	8.51	79.01	Menuju Informatif
5	LINGGO SARI BAGANTI	55.68	7.95	63.63	Cukup Informatif

III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	PRESENT ASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI ASI
1	AIR HAJI BARAT	88.63	9.47	98.10	Informatif
2	TAMBANG	87.26	9.25	96.51	Informatif
3	MUARA INDERAPURA	85.98	9.63	95.60	Informatif
4	LUNANG TIGA	80.74	5.46	86.20	Menuju Informatif
5	KOTO RAWANG	75.76	6.95	82.71	Menuju Informatif

**Tabel 3. 24 DAFTAR REKAP PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN**

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	89.76	9.52	99.28	Informatif
2	DINAS KESEHATAN	89.33	9.48	98.81	Informatif
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	87.69	9.42	97.10	Informatif

	PENCATATAN SIPIL				
4	DINAS Komunikasi dan Informatika	86.89	9.20	96.09	Informatif
5	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN	85.70	9.22	94.92	Informatif
6	DINAS PMD, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.17	9.60	91.76	Informatif

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	AIRPURA	83.22	8.81	92.03	Informatif
2	RANAH AMPEK HULU TAPAN	81.98	9.39	91.37	Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	75.78	8.99	84.77	Menuju Informatif
4	PANCUNG SOAL	75.96	7.32	83.28	Menuju Informatif
5	BATANG KAPAS	63.78	7.71	71.48	Cukup Informatif

III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	TAMBANG	89.60	9.78	99.38	Informatif
2	MUARA INDERAPURA	89.20	9.70	98.90	Informatif
3	AIR HAJI BARAT	87.84	9.52	97.36	Informatif
4	LUNANG TIGA	80.63	9.69	90.31	Informatif
5	PAINAN SELATAN PAINAN	71.60	9.43	81.03	Menuju Informatif

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi	INFORMATIF (99,00)	INFORMATIF (97,20)	MENUJU INFORMATIF (86,68)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.35 di atas dapat dilihat bahwa Kategori Keterbukaan Informasi Publik mengalami penurunan sebesar 10,8% dari INFORMATIF (97,20) pada Tahun 2023 menjadi MENUJU INFORMATIF (86,68).

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.26 dibawah ini :

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	MENUJU INFORMATIF (86,68)	86%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.27 dibawah ini.

Tabel 3. 27 Perbandingan Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	MENUJU INFORMATIF (86,68)	CUKUP INFORMATIF (75,03)	CUKUP INFORMATIF (75,65)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

<https://komisiinformasi.go.id/>

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada Tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3. 28 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	MENUJU INFORMATIF (86,68)	86%

Faktor penyebab kegagalan dalam indikator ini adalah :

PPID ditingkat nagari tidak aktif sehingga kurangnya Data Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan ke website PPID Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 182 Nagari hanya 34 Nagari yang melaksanakan publikasi DIP, hal ini disebabkan adanya pertukaran admin PPID yang ada di nagari.

[illegible]

Solusi yang dilakukan:

Perlu dilakukan pembinaan kepada admin-admin PPID baru tersebut untuk penguatan kapasitas admin PPID nagari agar target kinerja untuk keterbukaan

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 29 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Daya (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbuk aan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	MENUJU INFORMATIF (86,68)	86 %	1.106.452.776	914.631.901	83%	17%

Target Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 adalah INFORMATIF (99,95), dan untuk realisasinya Tahun sebesar MENUJU INFORMATIF (86,68) serta untuk capaian kinerja sebesar 86%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 10,8% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 97,20.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kegiatan terdiri dari :
 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- II. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 adalah sebesar Rp 914.631.901 atau 83% dari total anggaran sebesar Rp. 1.106.452.776, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 17%.



SASARAN 5 :

MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.30 dibawah ini.

Tabel 3. 30 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja		2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95%

Dari Tabel 3.30 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai 95,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 95,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)
2. Pengembangan Aplikasi SPBE
3. Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024 perihal Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024 maka ditetapkan bahwa ke tiga Inovasi yang Dinas Komunikasi dn Informatika di kirim ke Kementerian Dalam Negeri termasuk 2 Aplikasi yang dihasilkan pada Tahun 2023.

indeks.inovasi.bsikn.kemendagri.go.id/dashboard/inovasi-daerah

#	Pemda	Nama Inovasi*	Tipe Inovasi*	Nama Inisiator*	Penyusunan Utama	Inovasi Daerah*	Inovasi Daerah*	Kemampuan	Aksi
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Penerapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	komunikasi dan informatika	01/04/2019	08/05/2019	88.00	
2	Kabupaten Pesisir Selatan	Pengembangan Aplikasi SPBE	Penerapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	komunikasi dan informatika	06/03/2023	03/04/2023	95.00	
3	Kabupaten Pesisir Selatan	Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers	Penerapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	komunikasi dan informatika	04/04/2023	01/05/2023	95.00	

Gambar 3. 10 Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. H. Agus Salim Nomor 1 Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 26111
Telpom : 0795 31252 Pst. 0795 31252
Laman : <http://web.bsikn.kemendagri.go.id>

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 800.10.30.3/135/Inovasi/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024

Yth: 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zain Pahan
3. Direktur RSUD Pesisir Selatan
4. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan

di Tempat

Menindaklanjuti kegiatan Innovative Government Award (IGA) yang di selenggarakan oleh Badan Strategis Kabupaten Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan inovasi sebanyak 97 inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

- 93 Perangkat, 3 Inisiatif dan 1 uji coba.
- Inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui IGA adalah sebanyak 60 Inovasi.
- Tidak mengajukan atau melaporkan inovasi daerah :
 - 2 Perangkat Daerah;
 - 2 Kecamatan dan;
 - 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.114-896 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 89,26 atau termasuk dalam Predikat "KABUPATEN INOVATIF" (Rincian Terlampir)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap pejerangan kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,

MAWARD R. OROKA

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 500.10.30.3/135/Inovasi/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

**HASIL PELAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024**

1. PERANGKAT DAERAH, RSUD dan UPT PUSKESMAS YANG MELAPORKAN INOVASI TAHUN 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kemampuan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN RSUD					
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi SPBE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	95	Approve	Sangat Tinggi
		Pesetel dalam pengaman	Inovasi pelayanan publik	93	Approve	Sangat Tinggi
		OPEN DATA	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Sangat Tinggi
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Sangat Tinggi

Gambar 3. 11 Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024

Ada 20 indikator yang harus diisi OPD diantaranya adalah :

- Regulasi inovasi daerah*;
- Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
- Dukungan anggaran;
- Bimtek inovasi;
- Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- Keterlibatan aktor inovasi;
- Pelaksana inovasi daerah;
- Jejaring inovasi;
- Sosialisasi inovasi daerah;
- Pedoman teknis;

- k) Kemudahan informasi layanan;
 - l) Kecepatan penciptaan inovasi*;
 - m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
 - n) Penyelesaian layanan pengaduan;
 - o) Online sistem;
 - p) Replikasi;
 - q) Penggunaan IT;
 - r) Kemanfaatan inovasi*;
 - s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
 - t) Kualitas inovasi daerah*;
- * Indikator wajib diisi

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.31 dibawah ini :

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	85,00	97,00	95,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.31 di atas dapat dilihat bahwabahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,00% dari 97,00 pada Tahun 2023 menjadi 95,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.32 dibawah ini :

**Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilaiNilai Kematangan Inovasi PD dapat dilihat pada Tabel 3.33 dibawah ini :

Tabel 3. 33 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95%

Faktor penyebab kegagalan dalam indikator ini adalah :

Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan belum adanya replikasi oleh daerah lain

Solusi yang dilakukan

Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya mengusahakan adanya replikasi oleh daerah lain

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kemata ngan Inovasi PD	100	95	95%	4.927.716.282	4.554.285.437	92,42 %	7,58%

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.554.285.437 atau 92,42% dari total anggaran sebesar Rp. 4.927.716.282, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,58%.

3.4 Realisasi Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun anggaran 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 8.230.341.487,- yang seluruhnya bersumber pada APBD, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 4.074.247.413,- yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.482.419.487,- dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi anggaran dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian per Program sebagai berikut :

Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.927.716.282	4.554.285.437	92,42%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	2.133.502.713	2.196.172.429	92,42%
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.133.502.713	2.196.172.429	92,42%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	1.106.452.776,	914.631.901	82,66%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	4.927.716.282	4.554.285.437	92,42%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

a. Capaian Sasaran

Dari laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 khususnya di tahun anggaran 2024 dapat terpenuhi sesuai harapan. Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan baik sesuai ketentuan. Namun hal tersebut, bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua mencapai 100% hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran.

b. Capaian Indikator

Capaian terhadap 5 indikator dari 5 sasaran sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun pencapaian dari Indikator :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai 100%
- Indeks SPBE sebesar 101 %
- Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 92 %
- Kategori Keterbukaan Informasi Publik sebesar 86,7 %
- Nilai Kematangan Inovasi PD sebesar 95% .

c. Capaian Realisasi Keuangan

Tahun 2024`Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didukung anggaran sebesar Rp. 8.230.341.487,- yang seluruhnya bersumber pada APBD, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar 4.156.094.074,- yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.074.247.413,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.602.420.051,- (95%)

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun, selanjutnya diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Data Dukung :

1. Perjanjian Kinerja
2. Hasil Laporan SPBE dari Kemenpan RB
3. Surat Penyampaian Hasil Inovasi Daerah Tahun 2024